



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO:2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort  
Worth Tahun 2016-2022**

Skripsi

Oleh

Dita Puspa Dewi

6091901262

Pembimbing

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

Bandung

2023



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO:2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort  
Worth Tahun 2016-2022**

Skripsi

Oleh

Dita Puspa Dewi

6091901262

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dita Puspa Dewi  
Nomor Pokok : 6091901262  
Judul : Paradiplomasi dalam Kerja Sama Sister City Bandung-Fort Worth  
Tahun 2016-2022

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 8 Juni 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Sapta Dwikardana, Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

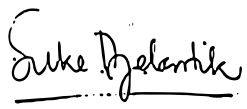
**Sekretaris**

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Prof. Sukawarsini Djelantik,  
Dra., M.Int.S., Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

### Daftar Perbaikan Skripsi

Nama : Dita Puspa Dewi  
 NPM : 6091901262  
 Dosen Pembimbing : Marshell Adi Putra, S.IP., MA.  
 Judul Penelitian : “Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort Worth Tahun 2016-2022”

No	Poin Perbaikan Skripsi	Setelah Perbaikan
1	Hapus kata “transisi” dalam judul “Paradipomasi dalam Kerja Sama <i>Sister City</i> Bandung-Fort Worth <del>pada Masa Transisi Pemerintahan Kota Bandung</del> 2016-2022”	“Paradiplomasi dalam Kerja Sama <i>Sister City</i> Bandung-Fort Worth Tahun 2016-2022”
2	Penulisan keterangan pada gambar <i>nine tracks diplomacy</i> pada BAB I seharusnya diletakkan sebelum keterangan	Tata letak sudah disesuaikan dengan arahan dari dosen penguji. Peletakan gambar <i>nine tracks diplomacy</i> diikuti dengan penjelasan teorinya
3	Penekanan terhadap penggunaan analisis SWOT pada BAB 3.	Analisis SWOT modifikasi pada BAB 3 sudah disesuaikan dengan arahan dosen penguji dan diletakkan pada sub-bab analisis 3.3
4	Pada BAB II perlu dijelaskan mengenai sejarah <i>sister city</i> Kota Bandung	Sejarah <i>sister city</i> diletakkan pada sub-bab 2.3
5	Kesimpulan perlu menjelaskan temuan dari analisis SWOT dan saran lebih baik dihapus saja	Poin kesimpulan sudah dirubah sesuai arahan dosen penguji dan BAB 4 hanya kesimpulan
6	Memasukkan 6 dimensi dalam konsep <i>city</i>	Poin 6 dimensi tersebut sudah dijelaskan

	<i>diplomacy</i>	kembali pada BAB 3 analisis
7	Hasil temuan dalam analisis SWOT dimasukkan ke dalam abstrak	Hasil temuan sudah dituliskan pada abstrak di kalimat penutup

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dita Puspa Dewi

NPM : 6091901262

Program Studi : Hubungan Internasional Program Sarjana

Judul : Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort Worth pada Masa Transisi Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2016-2022

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Mei 2023



Dita Puspa Dewi

**ABSTRACT**

Nama : Dita Puspa Dewi

NPM : 6091901262

Title : *Paradiplomacy in Bandung-Fort Worth Sister City 2016-2022*

---

*International relations that are no longer state-centric have created opportunities for sub-national actors to be involved in international cooperation. Indonesia is one of the countries that empowers local governments to engage in international activities. Bandung City implements foreign cooperation in the form of sister cities to accelerate development and build mutually beneficial fraternal relations. This research discusses the development of Bandung City paradiplomacy trend during the transition of government through sister city cooperation with the city of Fort Worth by using the theory of paradiplomacy and city diplomacy through descriptive analysis and modified SWOT method. The author found that due to the transition of government and the different interests of each mayor, the implementation of the Bandung-Fort Worth sister city tends to experience a decline in cooperation trends. This cooperation is still less effective due to several obstacles including limited budgets, high inflation rates, and the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** *Subnational government, Sister City, Paradiplomacy, City Diplomacy, Government transition.*

## ABSTRAK

Nama : Dita Puspa Dewi

NPM : 6091901262

Judul : Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort Worth  
Tahun 2016-2022

---

Hubungan internasional yang tidak lagi bersifat negara sentris telah memberikan peluang aktor-aktor sub-nasional untuk dapat berpartisipasi dalam kerja sama internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut memberikan kewenangan kepada pemerintah sub-nasional untuk aktif dalam kegiatan internasional. Kota Bandung melaksanakan kerja sama luar negeri dalam bentuk *sister city* untuk membantu percepatan pembangunan dan membangun hubungan persaudaraan yang saling menguntungkan. Penelitian ini membahas bagaimana perkembangan tren paradiplomasi Kota Bandung di masa transisi pemerintahan melalui kerja sama *sister city* dengan Kota Fort Worth dengan menggunakan teori Paradiplomasi dan *city diplomacy* melalui metode deskriptif analisis dan SWOT modifikasi. Penulis menemukan bahwa pelaksanaan *sister city* Bandung-Fort Worth cenderung mengalami penurunan tren kerja sama yang disebabkan oleh transisi pemerintahan dan perbedaan kepentingan dari masing-masing walikota. Kerja sama ini masih kurang efektif karena adanya beberapa hambatan antara lain anggaran yang terbatas, laju inflasi cukup tinggi, dan pandemi COVID-19.

**Kata kunci:** Pemerintah sub-nasional, *Sister City*, Paradiplomasi, *City Diplomacy*, Transisi Pemerintahan.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul “Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort Worth pada Masa Transisi Pemerintahan Kota Bandung” dengan tepat waktu. Isu tersebut menarik untuk dibahas karena penulis melihat bahwa pola kerja sama internasional sudah tidak lagi didominasi oleh aktor negara. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik Strata 1 (SI) Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Marshall Adi Putra, S.IP., MA., selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar mengarahkan, membimbing, dan membantu penulis sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun guna membantu menyempurnakan penelitian.

Bandung, 1 Mei 2023

Dita Puspa Dewi

## UCAPAN TERIMA KASIH

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah does not burden any soul with more than it can bear.”*

*Al-Baqarah 2: 286*

1. Kepada Allah SWT, tempat kami berlindung dan berserah serta penolong di segala masa. Terima kasih atas segala berkat, rahmat, kemudahan, serta kekuatan yang telah diberikan tiada batasan. Semoga Allah senantiasa selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kami;
2. Teruntuk Mamah, Bapak, dan Mas Agung, terima kasih atas segala kasih dan sayang serta doa yang selalu menyertai di setiap langkah ini. Terima kasih atas segala jerih payah dan upaya yang dilakukan untuk mendukung dari berbagai aspek sehingga Dita bisa sampai di titik ini. *I am blessed for everything that we had today, tomorrow, and forever. I couldn't make it this far without you who always got my back in the first place. I love you beyond measure;*
3. Mas Marshall, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala pembelajaran, masukan, dan arahan yang diberikan selama proses mengajar dan bimbingan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan dengan usaha yang terbaik;
4. Leoda Lundy Winona dan Dita Afriadi, *my always go to person since day 1 and my #1 source of dark jokes!. Thank you for making it a lot easier. I*

*thank you guys for all the ups and downs that bring us here to maturity, today. I love you bunch and I hope we'll continue to stick together in many years to come. Remember that whenever life gets you down, you've always got a friend in me. To infinity and beyond!;*

5. *To the Artillery Family, Yuani Kaesari, Yuan Ivory, Algunadi, Tesya Ananda, dan Kamilatunisa. Thank you for being there since day 1 in High School. Makasih udah banyak kasih bantuan psikis dan fisik. Makasih karena udah bertahan dengan segala bentuk tantangan yang datang. I'm glad to see you guys here with all of those sacrifices, happiness, sadness, and everything that has gone through. Cheers untuk segala sesuatu ke depan, semoga selalu yang terbaik ya. Berbahagialah!;*
6. *Anastassia Veronica a.k.a Sasa. Thank you for being there hearing those bucin-bucin stories of mine. I've just never expected that we could be as close as we are now. Makasih ya buat setiap sesi diskusinya dan keterbukaannya akan setiap cerita dan masukan ataupun pengalaman, because it means a lot. You're such a kind-hearted person, caring, and loving. God bless you, always!;*
7. *Teruntuk Kampus Tiga, terima kasih atas buku, pesta, dan cinta yang sempat diberikan dalam waktu singkat ini and I'm grateful for each second of it. The past years have changed me to become another (in a good way). Thank you for giving me the space and time to evolve into the person that I am today. As I'm leaving soon, I am confidently saying that I've and will continue to walk to be a better person than I was before;*

8. Terakhir, untuk Dita diriku sendiri. *You've done your best and let God do the rest. Thank you for not giving up when things are going tough dan makasih karena dikala jatuh ga pergi jauh-jauh selain menghampiri dirimu sendiri dan meraihnya lagi. It will never be easy for you, and it won't be either, but as long as you don't lose yourself, you're good. Just one thing that you should remember, this shall pass and you don't have to pretend as if you're the strongest human alive. If crying can heal and give you comfort, you shall do it right away. Keep it in mind: you're the product of your decisions, not the circumstances. God bless you, always!.*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR AKRONIM .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	8
1.2.2. Pembatasan Masalah .....	10
1.2.3. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	12
1.4. Kajian Pustaka.....	12
1.4.1. Kerangka Pemikiran.....	17
1.5. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
1.5.1. Metode Penelitian .....	30
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	31
<b>1.6. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>33</b>
<b>FAKTOR PENDUKUNG PARADIPLOMASI DAN PELAKSANAANYA DI KOTA BANDUNG.....</b>	<b>33</b>
2.1. Karakteristik Kota Bandung dan Kota Fort-Worth.....	34
2.1.1 Karakteristik Umum Kota Bandung (ditambahin cerita sisty bandung) .....	34
2.1.2 Karakteristik Umum Kota Fort Worth .....	37
2.2. Rencana Strategis Kota Bandung.....	40
2.3. Paradiplomasi Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City .....	46
2.1.2 Sister City Kota Bandung .....	46
2.1.2 Kerja Sama Sister City Bandung-Fort Worth .....	47
2.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Paradiplomasi Bandung - Fort Worth.....	52
2.4.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	53
2.4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri .....	54
2.4.3 Peraturan Menteri Luar Negeri .....	56

2.4.4 Peraturan Pemerintah .....	56
<b>BAB III .....</b>	<b>59</b>
<b>DINAMIKA KERJA SAMA SISTER CITY BANDUNG-FORT WORTH DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG.....</b>	<b>59</b>
3.1. Pelaksanaan Sister City Bandung-Fort Worth .....	59
3.2. Penerapan MoU dalam Ruang Lingkup Kerja Sama .....	63
3.2.1. Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.....	63
3.2.2. Bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, dan Kepariwisata.....	70
3.2.3. Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi .....	75
3.3. Sister City Bandung-Fort Worth pada Masa Transisi Pemerintahan Kota Bandung .....	79
3.3.1. Masa Pemerintahan Ridwan Kamil.....	80
3.3.2. Masa Pemerintahan Oded Muhammad Danial dan Yana Mulyana .	84
3.4. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan sister city .....	87
3.4.1. Anggaran .....	87
3.4.2. Laju Inflasi .....	89
3.4.3 Pandemi COVID-19.....	90
3.4.4. Perbedaan Kepentingan.....	91
3.5. Dampak, Peluang, dan Potensi Sister City Kota Bandung-Fort Worth .....	93
3.5.1. Bagi Kota Bandung .....	94
3.5.2. Bagi Kota Fort Worth .....	96
<b>BAB IV .....</b>	<b>99</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Bagan Diplomasi Multi Jalur (*Nine Tracks Diplomacy*) *Multi Track Diplomacy - A System Approach to Peace*. Dr, Louise Diamond & John W. McDonalds, 35 Halaman 22.

Gambar 2.1: Monumen Sister City Forth Worth – IPAA. Halaman 47.

Gambar 3.1: Program *Youth Ambassador Exchange* dalam misi pengenalan budaya melalui kunjungan ke perkebunan teh. Halaman 64.

Gambar 3.2: Program *Youth Ambassador Exchange* dalam misi pengenalan budaya melalui kunjungan ke perkebunan teh. Halamana 65.

Gambar 3.3: *Fort Worth Sister Cities* mempromosikan wisata lokal Bandung melalui unggahannya di sosial media Instagram. 71

Gambar 3.4: *Mayor's Dinner International* di Kota Fort Worth tahun 2018. Halaman 73.

Gambar 3.5: *Virtual Summit* antara Kota Bandung dan Fort Worth tahun 2020. Halaman 74.

Gambar 3.6: Kunjungan delegasi Fort Worth ke Bandung membahas kelanjutan tahun 2022. Halaman 75.

**DAFTAR AKRONIM**

ASN	Aparatur Sipil Negara
MOU	Memorandum Of Understanding
LOI	Letter Of Intent
NGO	Non-Governmental Organization
IGO	Intergovernmental Organization
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
UKM	Usaha Kecil Menengah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RJPMN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
ILA	International Leadership Academy
PTDI	PT Dirgantara Indonesia
BHTI	Bell Helicopter Textron Incorporated



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi telah memberikan pengaruh terhadap studi hubungan internasional. Hal tersebut tentu telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk menjadi aktor dalam urusan luar negeri. Kemajuan ini telah mendukung perkembangan di berbagai bidang seperti teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, perkembangan ini juga mendorong setiap negara untuk mulai menjalin kerja sama dengan negara lain. Saat ini, sebagian besar dari kita yang beranggapan bahwa negara merupakan satu-satunya aktor dalam melaksanakan segala kegiatan hubungan internasional. Tetapi, kini peluang tersebut telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota untuk membangun hubungan kerjasama dalam cakupan yang lebih luas secara internasional dan didukung oleh berlakunya otonomi daerah.

Globalisasi telah merubah bagaimana negara melihat kepentingannya dalam arena internasional, terutama pada wilayah perdagangan regional yang telah mengikis perbedaan antara urusan dalam negeri dan luar negeri. Hal tersebut juga telah mengubah cara pembagian tanggung jawab antara pemerintah negara dan sub-

nasional.<sup>1</sup> Pada saat yang bersamaan, restrukturisasi politik teritorial di dalam negara ini telah memunculkan aktor baru dalam praktik diplomasi. Era kontemporer saat ini telah mendukung adanya keterlibatan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional dimana hubungan luar negeri dapat dilakukan secara lebih spesifik dan fungsional agar lebih mudah untuk berkembang seiring dengan adanya globalisasi dan kebutuhan kawasan untuk beroperasi di pasar global.<sup>2</sup> Secara umum, hal tersebut disebut dengan istilah paradiplomasi ini diterjemahkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh entitas sub nasional atau *sub-state* dalam membantu melaksanakan kegiatan diplomasi bersama mitra luar negerinya.<sup>3</sup>

Wilayah kota merupakan skala utama di mana orang-orang banyak mengalami realitas hidup. Tidak meratanya pembangunan yang dikombinasikan dengan besarnya skala urbanisasi telah membuat pembangunan wilayah kota menjadi lebih penting dari sebelumnya terutama mendukung peningkatan ekonomi, tatanan politik, dan kesejahteraan sosial.<sup>4</sup> Alih-alih melihat urusan luar negeri dengan berpusat pada negara, paradiplomasi telah memberikan cara pandang yang berbeda di mana kota dan negara bagian dapat menjadi aktor baru dan terlibat langsung dalam hubungan internasional. Keberadaan tatanan dunia yang semakin berkembang serta didukung dengan adanya tuntutan untuk menjalin kerja sama luar negeri, diperlukan juga pengembangan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dalam usaha mencapai kepentingan nasional, negara dapat menggunakan identitas

---

<sup>1</sup> Francisco Aldecoa and Michael Keating, *Paradiplomacy in Action : The Foreign Relations of Subnational Governments* (London: Frank Cass, 2005), 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, 11.

<sup>3</sup> Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), 2–5.

<sup>4</sup> *Ibid*.

nasional yang baik dan menumbuhkan citra positif dengan negara lain. Paradiplomasi ini dapat dikatakan sebagai aktor selain negara yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Pemerintah daerah merupakan aktor baru dalam hubungan internasional yang keberadaannya perlu dipertimbangkan untuk mencapai kepentingan nasional. Aktor di dalamnya antara lain kota dan negara federasi yang beberapa diantaranya cukup independen untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan luar negeri mereka sendiri. Faktanya, paradiplomasi saat ini dapat dikatakan cenderung lebih aktif ketimbang sebelumnya, di mana sejumlah entitas sub nasional ini pada akhirnya terlibat dalam perjanjian internasional, memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka di sejumlah organisasi antar pemerintah, dan terlibat dalam kegiatan ekonomi.<sup>5</sup> Cornago (2010), menjelaskan bahwa paradiplomasi haruslah sesuai dengan kebijakan luar negeri pemerintah pusat agar pemerintahan daerah saling terhubung dengan diplomasi yang dilakukan di tingkat nasional.<sup>6</sup> Misi diplomatik selanjutnya diajukan ke dalam rapat koordinasi antar departemen sebelum rancangan kerja sama yang diusulkan oleh daerah disetujui oleh pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Pelaksanaan paradiplomasi di Indonesia, mulai ramai diperbincangkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, beliau mengatakan bahwa tanpa adanya kerja sama dengan pihak investor asing seperti

---

<sup>5</sup> Jean-Frédéric Morin and Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis : A Toolbox* (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 346.

<sup>6</sup> Takdir Ali Mukti et al., "Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea," *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (January 18, 2021): 139–52, <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.8931>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

pemerintah asing atau organisasi maka laju pertumbuhan ekonomi daerah akan sulit didorong untuk berkembang lebih cepat. Hal tersebut tentunya didukung oleh keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 42 ayat 1 yang menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>8</sup> Hasil dari kebijakan tersebut dikemas ke dalam sebuah kerja sama yang dapat terjalin dalam bentuk *sister city* maupun *sister province*. *Sister City* (kota kembar) adalah sebuah program kemitraan jangka panjang yang terjalin antara dua komunitas di kedua negara mitra.<sup>9</sup> Kerja sama ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara dua kota dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan melalui peningkatan hubungan bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan percepatan di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kuatnya arus globalisasi dan tren dunia dalam berkompetisi telah melahirkan kerja sama kota kembar ini sebagai sebuah upaya untuk memperoleh hasil yang optimal dalam mengejar kepentingan nasional.

Di Indonesia telah banyak pemerintahan daerah yang mulai melakukan kerja sama internasional baik dalam bentuk *sister city* maupun *sister province*. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjajaki kerja sama kota kembar dengan beberapa negara mitra dari mulai Benua Amerika, Eropa, dan Asia. Beberapa kerja sama tersebut telah menghasilkan banyak program kerja yang menguntungkan terutama dalam meningkatkan citra negara Indonesia. Pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), 2–5.

<sup>9</sup> “Sister Cities International (SCI),” Sister Cities International (SCI), accessed September 21, 2022, <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>.

kerja sama kota kembar di Kota Bandung mulai muncul pada tahun 1960 yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerja sama tertua di Indonesia dan seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung telah menjalin kerja sama kota kembar dengan beberapa kota lain.<sup>10</sup> Dari beberapa kerja sama yang dilakukan di berbagai benua tersebut, fokus penelitian ini akan cenderung pada kerja sama Kota Bandung dengan salah satu kota di Amerika Serikat yaitu, Fort Worth.

Terpilihnya Fort Worth sebagai mitra dari Kota Bandung dalam menjalankan kerja sama ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Fort Worth merupakan *leading sector* dari industri pesawat terbang ternama di kawasan Amerika Serikat sejak Perang Dunia. Disamping itu, kerja sama kedua kota kembar ini di inisiasikan oleh Prof. Dr. Ing. Bj. Habibie yang saat itu tengah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi serta menjadi Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Indonesia (IPTN). Pada saat itu, Indonesia sedang aktif dalam mengembangkan industri pesawat terbang buatan dalam negeri dan Kota Fort Worth dianggap sesuai untuk membantu pengembangan industri tersebut. Atas dasar tersebut, pemerintah berusaha menjalin kerja sama dalam bentuk *sister city* antara Kota Bandung dengan Fort Worth.<sup>11</sup>

Setelah adanya beberapa tahapan peninjauan kerja sama, pemerintah Kota Bandung berkeinginan lebih untuk menjalin hubungan kemitraan dengan Kota Fort

---

<sup>10</sup> Bagian Kerjasama Kota Bandung, “Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL) - Bagian Kerja Sama Kota Bandung,” Bagian Kerja Sama Kota Bandung, <http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>, diakses pada 21 September 2022.

<sup>11</sup> “BJ Habibie Jadi Mak Comblang, Ini 4 Fakta Tugu Sister City Bandung-Fort Worth ” Merdeka, <https://www.merdeka.com/jabar/cerita-tugu-sister-cities-di-bandung-hasil-mak-comblang-bj-habibie-dengan-amerika.html>, diakses pada 22 September 2022.

Worth yang dibuktikan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pendidikan, serta pariwisata pada tanggal 2 April 1990 oleh Walikotamadya Dati II Bandung, Ateng Wahyudi dan Walikota Fort Worth, Garey Gilley.<sup>12</sup>

Sampai dengan saat ini, kerja sama kota kembar ini telah melaksanakan berbagai program dari mulai pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi. Tetapi, tentu di dalam melaksanakan program kerja tersebut terdapat beberapa kendala dan kekurangan yang menyebabkan sulitnya kerja sama ini untuk dapat lebih dikembangkan dalam bidang lain. Seperti pada bidang ekonomi yang banyak terkendala karena masalah anggaran serta jarak antara dua kota yang terlampau jauh telah mengakibatkan kerja sama ekonomi tersebut mandek. Padahal, di masa pandemi kita perlu melakukan pemulihan ekonomi dan pergerakan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, kerja sama ini erat kaitannya dengan transisi pemerintahan yang berganti setiap lima tahun sekali. Dari lamanya rentang tahun, peneliti hanya akan memfokuskan penelitian pada tahun 2016-2022 di mana di tahun-tahun tersebut terjadi masa transisi pemerintahan yang berlangsung tiga kali. Urgensi masa transisi dalam penelitian ini akan menjadi penting kaitannya dengan beberapa program kerja dan keberlangsungan dari hubungan kota kembar itu sendiri.

Kerja sama ini dibentuk yang tentunya dijadikan sebagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk saling berkolaborasi dalam mencapai kepentingan nasional. Menariknya, kegiatan ini semakin didukung karena adanya desentralisasi di mana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menentukan dan membuat kebijakan dalam mengatur wilayahnya. Di era gempuran globalisasi yang kian merubah cara berkehidupan manusia, untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih signifikan. Melalui peran paradiplomasi Kota Bandung ini, negara dapat mencapai kepentingan nasional dengan ditunjang oleh identitas diri yang baik serta citra positif yang didapatkan dari negara lain.

Peran pemerintah daerah Kota Bandung dalam melaksanakan aktivitas diplomasi sebagai bagian dari aktor *sub-state* diyakini telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan Kota Bandung. Hubungan luar negeri yang dilakukan Kota Bandung secara berkala akan membantu pembangunan nasional jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakannya secara optimal. Kemudian, kerja sama ini juga akan membuka sebuah peluang yang luas bagi banyak pemangku kepentingan seperti pelaku bisnis, akademisi, pemerintahan, dan organisasi yang ikut berkontribusi dalam menjalankan hubungan luar negeri yang menguntungkan kedua belah pihak secara bersamaan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Paradiplomasi dalam Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort Worth Tahun 2016-2022.”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

### 1.2.1. Deskripsi Masalah

Kerja sama *sister city* telah memberikan dampak yang cukup besar bagi peningkatan citra positif negara. Berbagai program kerja yang dituangkan dalam MoU setidaknya telah memuat sebagian besar kepentingan nasional Indonesia. Keberadaan kota kembar tentu dapat meningkatkan volume kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, dan industri; pendidikan dan teknologi; pariwisata dan kebudayaan yang dianggap dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Kerja sama yang terjalin antara Kota Bandung dengan Fort Worth Amerika ini cenderung sudah lama dan telah memberikan hasil yang cukup signifikan di beberapa bidang seperti pendidikan. Kota Fort Worth secara berkelanjutan telah memberikan niat baiknya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Tetapi, signifikansi atas pelaksanaan program kerja di berbagai bidang selain pendidikan semakin dipertanyakan, terutama saat pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Situasi perekonomian yang memburuk tentunya telah memberikan tantangan serta tekanan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

Diawali dengan adanya kerja sama antara IPTN (sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia) dengan perusahaan industri pesawat terbang di Kota Fort Worth, yaitu *Bell-Helicopter Textron* (BHTI) yang dipandang sangat baik dan perlu dijaga hubungannya. Kemudian, kerja sama kota kembar ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama dalam beberapa bidang seperti sosial budaya, pendidikan dan olahraga, peningkatan



kapabilitas ASN, serta meningkatkan perekonomian perdagangan dengan perindustrian yang dilakukan melalui *sharing knowledge*. Promosi dan upaya penetrasi pasar untuk produk Kota Bandung juga turut menjadi program prioritas dalam kerja sama ini dengan melibatkan semua unsur atau para pemangku kepentingan. Bidang-bidang yang utarakan di atas tentunya menjadi tolak ukur apakah program kerja memang betul dilaksanakan secara merata atau hanya sebagian saja.

Saat ini kerja sama *sister city* Kota Bandung dengan Fort Worth masih belum efektif karena tidak meratanya program kerja yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan dan dituangkan dalam MoU. Hal itu dapat terlihat karena manfaatnya belum bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat kota yang bersangkutan. Dalam perjalanannya, program tersebut hanya sekedar dikelola, direncanakan, diorganisasikan, dan belum cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi kegiatannya pun dikendalikan oleh pemerintah daerah sendiri, sehingga belum sepenuhnya menyentuh komunitas kecil (*people to people contact*).<sup>13</sup> Kemudian, adanya penurunan tren kerja sama luar negeri dalam masa transisi pemerintahan dari Walikota Ridwan Kamil yang sebelumnya menjabat lalu dilanjutkan kepada pemerintahan dibawah Oded Muhammad Danial, dan terakhir sampai saat ini oleh Yana Mulyana. Secara umum, transisi pemerintahan tersebut dapat menghambat laju dari pengembangan kerja sama kedua belah pihak karena

---

<sup>13</sup> Septianis Afipah, "Diplomasi Indonesia : Kerjasama Sister City Bandung Dan Fort Worth Tahun 2010-2016" (2016), [https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=224234?p=show\\_detail&id=224234](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=224234?p=show_detail&id=224234).

masing-masing pemerintahan pasti telah mempunyai kepentingan serta kecenderungannya dalam membangun hubungan keluar maupun ke dalam.

Selain itu, bidang ekonomi menjadi salah satu program kerja sama yang kurang signifikan perkembangannya karena terhambat dengan jarak dan kurangnya pendanaan serta perhatian dari masing-masing pemimpin daerah kota. Hal tersebut menjadi tidak lumrah ketika dasar dari pelaksanaan kerja sama ini masih dalam ruang lingkup ekonomi dan industri, tetapi pada pelaksanaannya bidang-bidang tersebut malah kurang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Dalam menulis penelitian ini, penulis akan membatasi lingkup penelitian hanya pada paradiplomasi kerja sama *sister city* Kota Bandung dengan Fort Worth. Penulis akan lebih spesifik membahas hubungan kedua kota kembar yang dibatasi dalam kurun waktu tahun 2016-2022. Tahun-tahun berikut dipilih karena terdapat transisi kepemimpinan yang dapat dilihat dari dua sudut pandang pemerintahan yang berbeda yakni Walikota Ridwan Kamil, Oded Muhammad Danial, dan Yana Mulyana.

Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam kerja sama tersebut mengenai program kerja serta hambatannya yang terjadi di masa transisi pemerintahan dalam bidang ekonomi perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Selain itu, tahun 2016 dipilih karena pada saat tahun tersebut adanya peningkatan kerja sama yang dilakukan oleh Kota Bandung baik di level domestik

maupun internasional dan pada saat yang bersamaan Ridwan Kamil menjadi salah satu pemimpin yang aktif melaksanakan kunjungan kerja maupun membangun hubungan baik dengan kota-kota mitra.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut penelitian ini akan berfokus pada pertanyaan penelitian “Bagaimana perkembangan tren paradiplomasi Kota Bandung pada masa transisi pemerintahan melalui kerja sama *sister city* dengan Kota Fort Worth tahun 2016-2022?”

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik diplomasi yang saat ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama *sister city* Kota Bandung dengan Fort Worth dari tahun 2016-2022. Selain itu, penelitian ini akan berusaha menjelaskan aktivitas paradiplomasi melalui kota kembar kota Bandung dengan Fort Worth. Kemudian, penulis akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana kerja sama ini dilakukan di masa transisi pemerintahan beserta dengan capaian yang telah diraih dan hambatan-hambatan pada saat merealisasikan beberapa program kerjanya.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini akan berguna dan dapat dijadikan referensi baru mengenai paradiplomasi bagi para penstudi Hubungan Internasional dan lembaga pemerintahan di dalam pembuatan sebuah kebijakan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini akan menambah wawasan baru mengenai program *sister city* di mana merupakan salah satu bentuk implementasi dari paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor non-negara.

### **1.4. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mempelajari beberapa literatur berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Literatur pertama adalah "*Paradiplomacy and its Impact on EU Foreign Policy*" yang ditulis oleh Joanna Ciesielska, Klikowska, dan Tomasz Kamiński. Artikel Ilmiah tersebut membahas tentang paradiplomasi dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa. Menurut artikel jurnal tersebut, meskipun adanya banyak perubahan dan peluang yang diberikan oleh paradiplomasi ke Uni Eropa, tetapi masyarakat nampak belum siap untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh peran daerah dan kota yang berkembang. Saat ini, tidak ada pemahaman yang memadai tentang topik dalam struktur Uni Eropa atau pengakuan hubungan internasional kota dan wilayah. Sehingga akan menjadi sulit digunakan secara instrumental untuk memecahkan

masalah kebijakan luar negeri Uni Eropa. Hubungan sub regional ini dapat menyebabkan secara sengaja maupun tidak masalah serius tetapi juga menjadi alternatif yang bagus untuk hubungan di tingkat antar negara, terutama sebagai saluran komunikasi baru jika terjadi krisis di dalam Uni Eropa itu sendiri.<sup>14</sup>

Literatur kedua yang berjudul “*Paradiplomacy* Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama *Sister City*” ditulis oleh Gilang Nur Alam dan Arfin Sudirman yang mengkaji mengenai keterlibatan pemerintah kota Bandung dalam melaksanakan hubungan luar negerinya dan kemudian memfokuskan untuk memahami konsep *sister city* yang sudah dilakukan banyak di berbagai negara yang kemudian dilihat melalui pendekatan paradiplomasi di Indonesia. Menurut artikel jurnal tersebut, pelaksanaan *sister city* dapat membantu Indonesia di dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi. Artikel ini juga menjelaskan bahwa *sister city* yang terjadi pada Bandung-Suwon memiliki hubungan yang setara di mana menyebabkan hubungan yang terjalin akan harmonis sebab munculnya rasa saling menghargai dan menghormati antara kedua kota yang akan membantu Indonesia dalam proses pemerataan pembangunan di berbagai aspek khususnya ekonomi, sosial budaya, dan politik yang dilakukan melalui kota-kota. Adanya pola *bottom up* dan *top down* serta gabungan di antara keduanya menjadi pola yang ideal dalam menjalankan kerja sama tersebut, karena pada

---

<sup>14</sup> Joanna Ciesielska-Klikowska and Tomasz Kamiński, “Paradiplomacy and Its Impact on EU Foreign Policy,” *Journal of Contemporary European Research* 18, no. 1 (July 19, 2022), <https://doi.org/10.30950/jcer.v18i1.1223>.

dasarnya *sister city* ini tak lain adalah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat yang tinggal dan hidup di dalamnya.<sup>15</sup>

Literatur ketiga yang menjadi referensi adalah tesis yang dibuat oleh Septianis Afipah berjudul “Diplomasi Indonesia: Kerjasama *Sister City* Bandung dan Fort Worth Tahun 2010-2016” yang membahas diplomasi kebudayaan Indonesia melalui berbagai bentuk pertukaran ide, pandangan, pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan yang didukung dengan keaktifan kota Bandung dalam kerja sama internasional. Diplomasi kebudayaan yang terjalin tersebut dibentuk melalui sebuah program yang bernama *International Leaders Academy* (ILA), mengadakan program *sister school*, dan peninjauan kerja sama dalam program *sister university*. Hasil dari kegiatan diplomasi tersebut menurut Afipah dapat membangun citra positif dimata negara lain yang sesuai dengan salah satu tujuan dari diplomasi kebudayaan.<sup>16</sup>

Literatur keempat yang dijadikan referensi berjudul “*Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea*” ditulis oleh Takdir Ali Mukti, Laode Muhammad Fathun, Ali Muhammad, Stivani Ismawira Sinambela, dan Sugeng Riyanto. Artikel jurnal ini membahas mengenai kebijakan paradiplomasi di Indonesia dan Korea. Para penulis mengungkapkan bahwa meskipun kedua negara adalah negara kesatuan, aktivitas paradiplomasi berjalan dalam berbagai jenis. Provinsi dan kota di Indonesia menghadapi banyak batasan

---

<sup>15</sup> Gilang Nur Alam and Arfin Sudirman, “Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama *Sister City*,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, no. 1 (July 7, 2020): 31–50, <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>.

<sup>16</sup> Septianis Afipah, “Diplomasi Indonesia : Kerjasama *Sister City* Bandung Dan Fort Worth Tahun 2010-2016” (2016), [https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=224234?p=show\\_detail&id=224234](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=224234?p=show_detail&id=224234).

oleh peraturan nasional, sementara pemerintahan daerah di Korea memiliki lebih banyak keleluasaan dan kewenangan untuk mempraktikkan kegiatan paradiplomasi di seluruh dunia. Artikel jurnal ini juga menjelaskan bahwa beberapa provinsi di Indonesia menggunakan paradiplomasi sebagai instrumen untuk memberikan sebuah pengakuan internasional terkait penentuan nasib sendiri dan fakta serupa tersebut tidak berhasil ditemukan di Korea. Para penulis berpendapat bahwa adanya perbedaan jenis kebijakan paradiplomasi di kedua negara ini dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri yang biasanya dapat dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya gerakan nasional.<sup>17</sup>

Literatur kelima yang mendukung dasar penelitian berjudul “*Paradiplomacy As The Product of State Transformation in The Era of Globalisation: The Case of Indonesia*” ditulis oleh Ario Bimo Utomo. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa saat ini studi hubungan internasional telah semakin berbaur dengan konteks lokal yang membawa pada pendekatan yang lebih terdesentralisasi. Penulisnya juga berusaha menjelaskan peran pemerintah sub nasional dalam kegiatan luar negeri dengan studi kasus di Indonesia. Kebangkitan paradiplomasi di Indonesia menurutnya didorong oleh domestikasi isu-isu global, desentralisasi kekuasaan, dan fragmentasi dari lembaga pusat yang sebelumnya sangat kuat. Selain itu, globalisasi telah menciptakan pendekatan internasional-domestik (*intermestic*) yang mudah diserap di tingkat lokal untuk berbagai masalah kehidupan. Kemudian, kegiatan paradiplomasi dalam artikelnya dijelaskan dapat

---

<sup>17</sup> Takdir Ali Mukti et al., “Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea,” *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (January 18, 2021): 139–52, <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.8931>.

dilihat melalui dua cara: pertama, sebagai cara negara untuk berkompromi dengan tuntutan global; kedua, sebagai cara bagi daerah untuk menegaskan lokalitasnya di era globalisasi melalui kolaborasi spesifik dengan mitra asing. Penulisnya juga kemudian menegaskan bahwa karakteristik pemimpin mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan internasionalisasi, terutama dalam hal pemilihan mitra dan isu-isu global yang akan diterjemahkan ke dalam kerja sama.

Sebagian literatur-literatur tersebut hanya menjelaskan kegiatan paradiplomasi yang sudah mulai banyak dilakukan dan dianggap memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan internasional. Penelitian-penelitian sebelumnya juga hanya menyoroti hasil dari kegiatan paradiplomasi. Literatur pertama lebih cenderung menjelaskan dampak negatif dari kegiatan paradiplomasi yang berjalan di Eropa dapat menimbulkan konflik baru dalam pemecahan masalah kebijakannya. Literatur kedua dan ketiga cenderung memperlihatkan dampak positif dari kegiatan paradiplomasi yang dapat meningkatkan citra negara dalam memaksimalkan peluang daerah untuk aktif di arena internasional. Pada literatur keempat cenderung menjadi penengah dari literatur sebelumnya, di mana penulisnya berusaha menjelaskan bahwa dinamika politik di kedua negara yang menjalin kerja sama akan mempengaruhi proses paradiplomasi yang berlangsung. Kemudian, poin yang diutarakan dalam literatur keempat cenderung selaras dengan literatur kelima yang menjelaskan bahwa paradiplomasi merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari globalisasi dan karakteristik pemimpin yang dapat mempengaruhi proses paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor subnasionalnya. Dengan kehadiran paradiplomasi, kota-kota dapat memiliki



keleluasaan untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya.

Penelitian ini akan lebih berfokus pada pembedahan masalah paradiplomasi Kota Bandung melalui program kerja sama *sister city* pada masa transisi pemerintahan yang berbeda dalam rentang tahun 2016-2022. Di samping itu juga, peneliti akan menggali lebih dalam mengenai dampak dari transisi pemerintahan tersebut terhadap tren kerja sama yang sedang berlangsung. Meninjau ada beberapa program yang mangkrak akibat pandemi COVID 19 dan prospek ke depan dari kerja sama dari kota kembar ini, maka penulis juga ingin menyoroti bagaimana tantangan ke depannya bagi kelangsungan kerja sama *sister city* Kota Bandung-Fort Worth.

#### **1.4.1. Kerangka Pemikiran**

Hubungan internasional kontemporer saat ini tidak lagi hanya berfokus pada negara yang menjadi satu-satunya aktor, melainkan perkembangan isu internasional telah sampai pada memunculkan aktor-aktor baru utamanya dalam isu transnasional. Di dalam konteks permasalahan transnasional, pemerintah regional juga dapat melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negara dengan taraf tertentu dan di dalamnya mereka juga menyusun sebuah kebijakan kerja sama luar negerinya.

Menurut Stefan Wolff, partisipasi entitas-entitas otonom di arena internasional telah menunjukkan bahwa pengertian kedaulatan telah berubah secara

fundamental. Kedaulatan tidak lagi hanya dikonseptualisasikan dalam istilah eksklusif untuk negara dari sistem Westphalia. Agar negara dapat menikmati sekaligus mendapat manfaat dari kedaulatan tersebut, maka negara harus berbagi kekuasaan dengan aktor lain di arena internasional. Namun, pada kasus paradiplomasi juga dengan jelas menunjukkan bahwa negara tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi: paradiplomasi, merupakan kompetensi yang dilimpahkan kepada entitas-entitas otonom. Oleh karena itu, hanya negara berdaulat yang dapat menentukan seberapa besar kekuasaan yang akan mereka bagikan.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Inanc dan Ozler, fenomena globalisasi saat ini yang terjadi karena adanya peningkatan arus informasi, modal, pelayanan, dan lalu lintas untuk orang dan barang diharapkan dapat menutup kesenjangan yang ada di antara perbedaan budaya, politik, dan ekonomi antar bangsa, sekalipun globalisasi tidak selalu berarti terjadinya kesatuan secara ekonomi dan politik di masyarakat suatu negara.<sup>19</sup> Adanya keberadaan dari proses *de-bordering the world of state* yang muncul berlawanan dengan prinsip *Westphalian* ini telah menunjukkan bahwa peniadaan batas-batas negara di antara bangsa-bangsa di dunia, di mana negara-negara berbagi atas otoritas eksklusif dalam pembuatan kebijakannya dengan aktor internasional juga aktor-aktor sub-nasionalnya.

---

<sup>18</sup> Wolff, Stefan, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, hal. 1-2, dan 13, University of Nottingham, 2009.

<sup>19</sup> Inanc, Hüsamettin dan Ozler, Hayrettin, dalam, *Democratic Deficit in EU: Is there an institutional solution to over-institutionalization?* Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 6, No.1&2, Spring & Summer 2007 hal. 127

Arti penting peran daerah otonom dalam studi hubungan internasional tidak dapat dikesampingkan karena relatifnya daerah otonom dapat melakukan interaksi internasional secara langsung dengan pihak-pihak asing yang bersifat antar pemerintahan maupun kerja sama dengan non-pemerintah asing. Aktor-aktor tersebut beragam dan dapat berwujud kelompok masyarakat, perusahaan multinasional, maupun bagian dari birokrasi pemerintahan yang ada di suatu negara. Terdapat dua kecenderungan sifat hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam membagi kedaulatan menurut David Crikemans, yaitu bersifat kooperatif dan konfliktual.

Robert C. Keohane memaparkan bahwa hubungan internasional yang anarkis dan cenderung berkonflik sudah tidak relevan dengan keadaan di lapangan. Keohane mengembangkan konsep transnasionalisme untuk menjawab tantangan dan fenomena yang terjadi saat ini. Konsep transnasionalisme telah menggeser isu-isu mengenai keamanan internasional menjadi ekonomi politik dunia, aktor hubungan antar bangsa tidak lagi bersifat negara sentris melainkan ada berbagai aktor transnasional, dan interaksi internasional tidak lagi bersifat *interstate relations* melainkan transnasional dan *transgovernmental relations*.<sup>20</sup> Arnold Wolfers turut menjelaskan mengenai pentingnya interaksi antar masyarakat dan aktor transnasional dalam kebijakan luar negeri.<sup>21</sup>

Bicara mengenai hubungan luar negeri suatu negara tidak akan berpaling dari sebuah interaksi yang terjadi dari aktor ke aktor. Aktor-aktor tersebut tentu

---

<sup>20</sup> Takdir Ali Mukti, *Op. Cit* 26.

<sup>21</sup> Joseph S. Nye and Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction," *International Organization* 25, no. 3 (1971): 329–49, <http://www.jstor.org/stable/2706043>.

memiliki peran dan kepentingannya masing-masing dalam hubungan internasional. Menjalinkan hubungan dengan negara lain merupakan salah satu bentuk mewujudkan perdamaian dunia. Di dalam hubungan internasional, biasanya negara mempunyai perwakilan dalam mengurus relasi antar negaranya antara lain yakni melalui seorang diplomat, konsulat jenderal, maupun kementerian. Jauh sebelum adanya modernisasi, hubungan internasional hanya terpaku pada urusan *high politics* yang aktor utamanya adalah negara. Tetapi, saat ini adanya perkembangan isu dalam hubungan internasional lebih cenderung berkembang ke arah *low politics*.

Negara memiliki kepentingan nasional untuk digunakan sebagai landasan dari politik luar negerinya yang berbentuk dalam sebuah kebijakan untuk dapat diterapkan ke dalam hubungan internasional guna mencapai tujuan nasionalnya.<sup>22</sup> Selain itu, negara juga memiliki beberapa instrumen politik luar negeri, yaitu politik, diplomasi, informasi, ekonomi, dan militer.<sup>23</sup> Interaksi-interaksi yang terjalin antara negara-negara tersebut dapat meningkatkan adanya peluang untuk berkonflik ataupun kerja sama. Mengacu pada tujuan dari diplomasi itu sendiri, setidaknya terdapat tiga model dari perilaku negara, yaitu: (1) Kooperatif; (2) Akomodasi; dan (3) Oposisi. Perilaku kooperatif dapat dilihat dari seberapa banyak negara melakukan kerja sama luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Diplomasi erat kaitannya dengan politik luar negeri karenanya adalah salah satu implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara yang memang terlatih.<sup>24</sup>

---

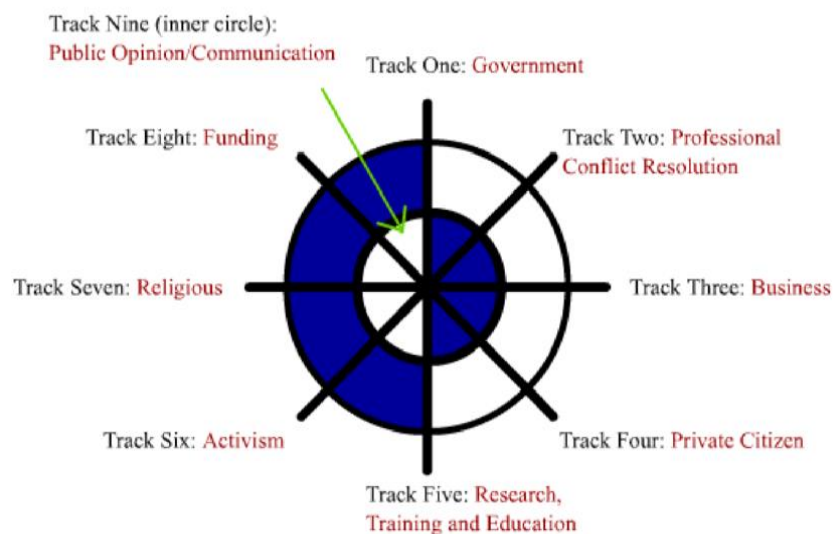
<sup>22</sup> Howard H Lentner, *Foreign Policy Analysis; a Comparative and Conceptual Approach* (Columbus, Ohio: Merrill, 1974), 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi: Antara Teori & Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 50.

Menurut Ernest Satow, diplomasi adalah penerapan intelijen dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara bawahan.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Jack Plano dan Ray Olton, diplomasi adalah praktik yang memudahkan hubungan antara negara dengan menggunakan jalur formal yang mencakup seluruh hubungan luar negeri, perumusan kebijakan, dan eksekusi.<sup>26</sup> Terdapat tiga bentuk dari diplomasi, yaitu diplomasi jalur pertama (*first track diplomacy*) yang sering dilakukan oleh pemerintah ke pemerintah (*G to G*), lalu diplomasi jalur kedua (*second track diplomacy*) yakni dilakukan oleh aktor non negara, dan terakhir diplomasi multi jalur (*multi track diplomacy*).<sup>27</sup>

Gambar 1.1: Bagan Diplomasi Multijalur (*Nine Tracks Diplomacy*)



Sumber: *Multi Track Diplomacy - A System Approach to Peace* Dr, Louise Diamond & John W. McDonalds, 35.

<sup>25</sup> Ernest Satow, *Guide to Diplomatic Practice* (Ravenio Books, 1917).

<sup>26</sup> Jack C Plano, Roy Olton, and Abc-Clio, *The International Relations Dictionary* (Santa Barbara: Abc-Clio, Inc, 1990), 234.

<sup>27</sup> Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, 12-19.

Pada diplomasi jalur pertama, terdapat setidaknya tiga aktor yang terlibat dalam bernegosiasi, yakni kepala negara, kementerian luar negeri, dan perwakilan resmi yang ditunjuk langsung oleh negara. Diplomasi jalur pertama ini cenderung bersifat resmi dan kaku, di mana terlihat dari isu-isu yang dibahas adalah mengenai isu *high politics*.<sup>28</sup> Berbeda dengan diplomasi jalur kedua, di mana aktor yang memiliki peran signifikan adalah aktor non negara NGO, IGO, maupun LSM. Diplomasi ini lebih mengutamakan isu *low politics* seperti *gender*, lingkungan, dan media yang lebih menjadikan peningkatan komunikasi untuk membangun rasa saling pengertian.<sup>29</sup> Sedangkan diplomasi multi jalur merupakan gabungan dari kedua diplomasi tersebut, di mana terdapat jalur yang resmi dan bukan resmi untuk mencapai kepentingannya. Diplomasi jalur ini melibatkan banyak aktor mulai dari negara, pelaku bisnis, para aktivis, partai politik, media, dan publik. Dr. Louise Diamond berpandangan bahwa diplomasi multi jalur ini terbentuk dari hubungan kompleks antara sembilan jalur diplomasi, yaitu pemerintah, non-pemerintah atau praktisi profesional, pelaku bisnis, warga negara khusus yang berkepentingan, edukasi dan pelatihan, para aktivis, agama, dan pendanaan.<sup>30</sup>

Diplomasi publik merupakan salah satu faktor yang penting dalam mencapai keberhasilan dari diplomasi itu sendiri, di mana banyak peran aktor non-negara yang mulai bermunculan dan menyebabkan negara bukan lagi menjadi satu-

---

<sup>28</sup> Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, 20.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Dr. Louise Diamond and John W McDonald, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace* (Sterling: Kumarian press, 1996), 35.

satunya aktor dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Hans Tuch, diplomasi publik merupakan sebuah proses berkomunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang jangkauannya lebih luas dalam upaya mewujudkan kebijakan dan tujuan nasional, sehingga dapat membentuk suatu pandangan positif terhadap suatu negara.<sup>31</sup> Diplomasi publik ini ditujukan untuk publik asing yang sosialisasinya pun berbeda dari diplomasi untuk sasaran domestik. Dalam konteks domestik, sosialisasi diplomasi adalah yang akrab dikenal oleh khalayak dilakukan oleh kementerian luar negeri, saat ini dimensi keterlibatan dalam dan luar negeri dengan 'publik' lebih terhubung daripada sebelumnya. Selain itu, diplomasi publik juga digambarkan sebagai komunikasi satu arah atau maksimal dua arah. Tetapi pada dasarnya, diplomasi publik dilakukan untuk menyampaikan aspek-aspek positif yang dimiliki negara kepada publik asing.<sup>32</sup> Dalam hal ini diplomasi publik semakin menonjol pada saat dilibatkan dalam hubungan bilateral. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dapat diupayakan oleh organisasi internasional. Di sisi lain, diplomasi publik berperan untuk saling melengkapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan, dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.<sup>33</sup>

Perkembangan diplomasi publik telah menciptakan konsep baru yang lebih cenderung memberikan penekanan pada peran pemerintah sub nasional. Adanya desentralisasi kekuasaan politik atau tanggung jawab administratif adalah proses yang sebagian besar dipelajari karena memberikan dampak terhadap institusi

---

<sup>31</sup> Jan Melissen, *The New Public Diplomacy : Soft Power in International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 12.

<sup>32</sup> *Ibid*, 13.

<sup>33</sup> Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, 190-191.

politik dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah sub nasional diperlakukan sebagai aktor yang muncul atau mapan dalam politik domestik. Hal yang sering terlupakan adalah bahwa pemerintah daerah juga dapat beroperasi menjadi aktor internasional. Fenomena pemerintah daerah yang mengembangkan hubungan internasional sering disebut oleh *paradiplomacy*.

*Paradiplomacy* atau *parallel diplomacy* yang pertama kali muncul sekitar tahun 1980 an yang ditulis oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos. Konsep ini muncul karena adanya perdebatan antara Presiden AS Richard Nixon yang membawa model '*new federalism*' terhadap pemerintahannya, di mana terdapat sebuah rencana untuk menyerahkan kendali atas beberapa program federal kepada pemerintah negara bagian dan lokal. Soldatos (1990:17), melihat paradiplomasi dengan mengacu pada diplomasi dan mendefinisikannya sebagai sebuah kegiatan internasional langsung oleh aktor subnasional yang mendukung, melengkapi, mengoreksi, menduplikasi, atau menantang diplomasi yang pada umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa.<sup>34</sup> UNDP juga menggunakan istilah ini secara berulang dan mendefinisikannya sebagai sebuah kemitraan baru yang berfokus pada hubungan langsung antar wilayah regional, sebagai lawan dari model yang mempromosikan kerja sama bilateral di tingkat nasional.<sup>35</sup>

Paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional lebih bersifat pragmatik, ditargetkan, dan oportunistik. Hal tersebut menjadi demikian karena hubungan luar negeri yang dilakukan oleh aktor subnasional umumnya dilakukan

---

<sup>34</sup> Rodrigo Tavares, *Paradiplomacy : Cities and States as Global Players* (New York: Oxford University Press, Cop, 2016), 8.

<sup>35</sup> *Ibid*, 9.



dengan adanya kompetensi daerah.<sup>36</sup> Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah subnasional di masyarakat maju tentunya dapat memiliki banyak fokus yang berbeda. Andre Le Cours menjelaskan setidaknya terdapat tiga lapisan untuk menjelaskan fokus dari paradiplomasi. Lapisan pertama mengenai isu ekonomi, di mana pemerintah subnasional bertujuan untuk mengembangkan kehadiran internasional untuk tujuan menarik investasi asing, memikat perusahaan internasional ke kawasan ini, dan menargetkan pasar baru untuk kegiatan ekspor. Lapisan kedua adalah kerja sama yang melibatkan berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, teknologi, dll. Di sini, paradiplomasi lebih bersifat luas dan multidimensional karena tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi. Lapisan ketiga melibatkan pertimbangan politik, di mana lapisan ini cenderung menampilkan secara mencolok ekspresi internasional dari identitas yang berbeda dari yang diproyeksikan oleh negara pusat. Di sini, pemerintah subnasional berusaha mengembangkan serangkaian hubungan internasional yang akan menegaskan ciri khas dari budaya, ekonomi politik, dan karakter nasional komunitas yang mereka wakili.<sup>37</sup>

Aktivitas paradiplomasi dapat dikatakan sebagai kegiatan *low diplomacy* yang menjadi arena pemerintah daerah. Di Indonesia, kegiatan paradiplomasi masih berada di tataran politik tingkat rendah, yang lebih banyak menjalin persahabatan antara wilayah yang berlanjut pada kerja sama ekonomi dan tetap di bawah koordinasi serta supervisi pemerintah pusat. Koordinasi dan supervisi dilakukan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 29.

<sup>37</sup> Lecours, André. "Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World." Clingendael Institute, 2008. <http://www.jstor.org/stable/resrep05373>.

oleh tiga kementerian utama, yaitu: Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian teknis terkait.<sup>38</sup> Paradiplomasi dibentuk sebagai pemberdayaan pemerintah daerah dalam bidang hubungan luar negeri yang diperlukan seiringan dengan diterimanya paham *multitrack diplomacy* sebagai tuntutan yang nyata terhadap kehidupan hubungan internasional.<sup>39</sup>

Paradiplomasi dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional, karena dengan adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam mencapai kepentingan nasional. Di dalam implementasinya, pemerintah subnasional bertanggung jawab atas kemajuan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup politik komunitas mereka sendiri di dalamnya. Agar tetap menjaga standar hidup rakyatnya, tidak hanya negara tetapi juga komunitas yang berada di teritorial subnasional harus terlibat dalam kegiatan lintas kedaulatan yang dapat melambungkan politik dan fisik mereka secara lebih luas dan melampaui batas-batas nasional. Ivo Duchacek menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe paradiplomasi berdasarkan dimensi geopolitik, antara lain: (1) *transborder regional paradiplomacy*, ini merujuk pada hubungan institusional baik dalam bentuk formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah subnasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis, (2) *transregional (macro regional)*

---

<sup>38</sup> Kurniawan Ariadi, "Paradiplomasi, Otonomi Daerah, Dan Hubungan Luar Negeri," *Perencanaan Pembangunan* 21 (2000), <https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/artikel-jurnal/14294e67-7fb7-4ddb-b835-3b032d6a8832>.

<sup>39</sup> Adirini Pujayanti, "Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 7, no. 1 (October 8, 2018): 82, <https://doi.org/10.22212/jp.v7i1.1118>.

dan *paradiplomatic contacts* adalah sebuah hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional dan berbeda negara serta tidak berbatasan langsung, namun negara di mana kedua pemerintah subnasional tersebut berada berbatasan langsung di dalam satu kawasan, (3) *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang menjalin hubungan diplomasi tetapi berada di dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dan dari berbagai belahan dunia.<sup>40</sup> Sebenarnya tidak ada perbedaan nyata antara paradiplomasi dan diplomasi tradisional, tujuannya tetap untuk bernegosiasi dan mengimplementasikan perjanjian berdasarkan kebersamaan yang bersyarat.<sup>41</sup>

Paradiplomasi pada umumnya berfokus pada pengembangan ekonomi yang tentu memerlukan strategi tertentu di dalam pelaksanaannya. Strategi tersebut salah satunya adalah menargetkan jenis investasi tertentu dan dapat melengkapi kegiatan perekonomian daerah yang telah ada. Sehingga, adanya pengembangan terhadap pelaku ekonomi kecil dan menengah yang dapat merasakan dampaknya. Untuk kerja sama bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memerlukan bantuan pemasaran dan promosi ekspor, pemerintah daerah haruslah bersinergi di dalam sebuah kerja sama internasional dan penting untuk memetakan strategi pasar untuk meningkatkan daya saing.<sup>42</sup>

Peluang baru telah diciptakan bagi aktor non-negara untuk terlibat karena dimensi ekonomi, budaya, dan politik pada globalisasi telah melemahkan tanggung

---

<sup>40</sup> Ivo D. Duchacek, "Perforated Sovereignities: Towards a Typology of New Actors in International Relations," in *Federalism and International Relations; the Role of Subnational Units*, ed. Hans J. Michelmann and Panayotis Soldatos (New York: Oxford University Press, 1990), 16.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Adirini Pujayanti, *Loc. Cit.*

jawab dan fungsi negara. Pada saat yang sama wilayah, negara bagian, dan kota kecil telah berubah menjadi lebih internasional karena imigrasi di seluruh dunia telah meningkat, baik karena kemajuan teknologi maupun pecahnya konflik.<sup>43</sup> Berfokus pada keterlibatan kota dalam diplomasi, pandangan yang tersebar luas adalah bahwa bagaimana aktor negara dan kota telah berada di berbagai wilayah dari apa yang disebut '*two worlds of world politics*'. Pertama, terdapat '*state centric world*' di mana aktor utamanya negara. Kedua, adanya keragaman yang disebut sebagai '*multicentric world*' di mana kota-kota dan aktor non-negara lainnya dapat menjadi aktor.<sup>44</sup>

*City diplomacy* didefinisikan sebagai sebuah institusi dan proses di mana kota-kota terlibat dalam hubungan dengan aktor-aktor di panggung politik internasional dengan tujuan mewakili diri mereka sendiri dan kepentingannya satu sama lain. Diplomasi kota dapat dianggap sebagai bentuk dari desentralisasi manajemen hubungan internasional dengan memilih kota sebagai aktor utama. Dengan beratas namakan kota, aktor-aktor ini dapat terlibat dalam hubungan dengan aktor lain di panggung politik internasional melalui interaksi dua sisi atau multi sisi. Diplomasi kota dua sisi adalah proses diplomatik di mana dua pihak terlibat dan setidaknya salah satu pihak adalah perwakilan dari sebuah kota. Tujuan utamanya antara lain agar dapat menciptakan manfaat bagi satu ataupun kedua belah pihak. Diplomasi kota multi sisi adalah proses diplomatik di mana lebih dari dua pihak terlibat yang mewakili berbagai kota.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Van Der and Jan Melissen, *City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics* (The Hague: Netherlands Institute Of International Relations 'Clingendael, 2007), 8.

<sup>44</sup> James N Rosenau, *Turbulence in World Politics* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 243–97.

<sup>45</sup> Van Der and Jan Melissen, *Op. Cit.*, 11-12.

Diplomasi kota memiliki enam dimensi utama yakni keamanan, pembangunan, ekonomi, budaya, *networks*, dan representasi.<sup>46</sup> Ada beberapa faktor yang mendukung keterlibatan kota untuk terjun dalam hubungan internasional. Faktor-faktor tersebut terbagi kembali menjadi dua bagian yakni internal dan eksternal. Di dalam faktor internal, pertama kota memiliki keinginan untuk melayani kepentingan kota mereka dan komunitasnya. Kedua, adanya tekanan dari masyarakat yang memaksa perwakilan kota mereka untuk terlibat dalam kegiatan diplomatik tertentu dan diplomasi kota dalam pengertian tersebut merupakan sebuah perwujudan dari aktivisme masyarakat. Ketiga, sama seperti negara-negara yang ingin melindungi tata kelola hukum internasional dan berkontribusi dalam memberikan kesejahteraan, kota-kota juga dapat memiliki sifat idealis yang sama untuk dapat terlibat dalam diplomasi.

Selain faktor internal tersebut, terdapat empat faktor eksternal yang secara signifikan menentukan pola keterlibatan kota-kota dalam diplomasi. Pertama, faktor terpenting dalam hal ini adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh kota. Sumber daya ini dapat dibagi menjadi sumber daya yang tidak berwujud seperti budaya politik kotamadya dan sumber daya nyata seperti uang, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan mekanisme kerja sama dan kekuatan birokrasi. Kedua, karakter dari sistem yang dimiliki oleh negara merupakan penentu untuk mengukur sejauh mana kita dapat terlibat dalam diplomasi. Kota akan memiliki banyak otonomi yang sangat tergantung pada sejauh mana budaya pelimpahan kekuasaan yang ada di negara bersangkutan. Biasanya hal tersebut

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 20.

diekspresikan dalam sebuah pola aturan formal dan informal yang berdampak pada kepentingan dan kegiatan sub nasional dalam masalah kebijakan luar negeri. Ketiga, keterkaitan antara pemerintah pusat dan kota di mana kepentingan lokal sangat banyak diwakili oleh pemerintah pusat yang akhirnya menyebabkan kepentingan lokal kurang terwakili. Keempat, lokasi kota dari setiap negara memiliki pengaruh yang besar dan menentukan perannya di panggung diplomatik.<sup>47</sup>

Dengan begitu, paradiplomasi dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan baru di dalam hubungan internasional di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor di dalamnya. Pemerintah daerah di Indonesia sebagai salah satu aktor non negara telah mengambil perannya dan memanfaatkan paradiplomasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dari pelaksanaan paradiplomasi adalah kerja sama *sister city* yang utamanya saat ini tengah dilakukan oleh kota-kota di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap berbagai bidang yang menjadi fokus bagian dari kerja sama.

## **1.5. Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.5.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penulis mengumpulkan data dan fakta

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 14-17.

terkait objek penelitian untuk menganalisis capaian dan hambatan dari kerja sama *sister city* Bandung-Fort Worth dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Data dan fakta yang didapat kemudian akan dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan gambaran terhadap objek penelitian.<sup>48</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis SWOT yang dimodifikasi untuk memperkuat argumen pada setiap analisis.

### **1.5.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mencari data-data dan sumber yang relevan dengan jenis penelitian melalui buku, koran, artikel, jurnal, dan internet. Penulis juga akan melengkapi data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait dari Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung yang berperan sebagai aktor penting dalam pelaksanaan hubungan kerja sama luar negeri dan menyangkut penyebaran informasi terkait hubungan diplomasi yang dilakukan oleh kota Bandung.

### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 4 BAB dengan masing-masing pembahasannya sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Beverly Hancock, Elizabeth Ockleford, dan Kate Windrige, "Introduction to Qualitative Research", NIHR RDS EM/YH, Sheffield: 2009.

- Pada BAB I penulisan skripsi ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan daripada topik yang akan diteliti.
- Pada BAB II akan membahas Faktor yang Mendasari Fenomena Paradiplomasi dan Pelaksanaannya di Kota Bandung.
- Pada BAB III akan membahas mengenai Dinamika Kerja Sama *Sister City* Bandung-Fort Worth dalam Masa Transisi Pemerintahan Kota Bandung.
- Pada BAB IV akan membahas tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian ini.